

KUASA, PENGETAHUAN, DAN POLITIK STANDAR BERKELANJUTAN

Claudia Syarifah

Universitas Wahid Hasyim

syarifahclaudia@gmail.com

ABSTRAK

Munculnya kerangka kerja standar berkelanjutan mencerminkan meningkatnya kepedulian global terhadap keberlanjutan. Namun, perumusan dan penegakan standar ini jauh dari proses yang netral atau diterima secara universal. Standar itu muncul dalam jaringan relasi kekuasaan, produksi pengetahuan melalui kontestasi yang sengit, serta pertimbangan geopolitik. Korporasi sering memimpin inisiatif penetapan standar, memanfaatkan sumber daya keuangan dan jangkauan global mereka untuk memengaruhi hasil yang selaras dengan model bisnis mereka. Selain itu, lembaga multilateral memainkan peran penting dalam membingkai tolok ukur global. Lembaga-lembaga ini diharapkan untuk mempertahankan netralitas dan inklusivitas tetapi secara inheren dibentuk oleh kepentingan dan ideologi anggotanya yang paling berpengaruh, biasanya negara-negara kaya dan perusahaan besar; ini menimbulkan pertanyaan tentang inklusivitas dan legitimasi standar ini, terutama bagi pemangku kepentingan di Negara Selatan yang mungkin tidak memiliki perwakilan dalam forum ini. Dominasi paradigma ilmiah Barat secara historis diposisikan sebagai otoritas tertinggi tentang keberlanjutan mencerminkan dan memperkuat ketidakseimbangan kekuatan global. Peneliti berusaha mengeksplorasi interaksi antara kekuasaan, produksi pengetahuan, dan kepentingan politik dalam mengembangkan dan menerapkan standar berkelanjutan. Adapun studi ini menggunakan kerangka metodologi kualitatif untuk menyelidiki bagaimana standar berkelanjutan muncul, kepentingan siapa yang mereka layani, dan implikasinya terhadap tata kelola global yang adil. Temuan ini mengungkapkan bahwa asimetri kekuasaan, produksi pengetahuan yang digerakkan oleh para ahli dan kepentingan geopolitik yang secara signifikan memengaruhi standar berkelanjutan. Hal ini meningkatkan kekhawatiran tentang legitimasi dan inklusivitas standar keberlanjutan yang diberlakukan secara universal.

Kata kunci: Dinamika kekuasaan, standar berkelanjutan, produksi pengetahuan, politik global

ABSTRACT

The emergence of sustainability standards frameworks reflects growing global concern for sustainability. However, the formulation and enforcement of these standards are far from neutral or universally accepted processes. They emerge within a web of power relations, contested knowledge production, and geopolitical considerations. Corporations often lead standard-setting initiatives, leveraging their financial resources and global reach to influence outcomes that align with their business models. In addition, multilateral institutions play a critical role in framing global benchmarks. These institutions are expected to maintain neutrality and inclusiveness but are inherently shaped by the interests and ideologies of their most influential members, typically wealthy nations and large corporations; this raises questions about the inclusiveness and legitimacy of these standards, particularly for stakeholders in the Global South who may not have representation in these forums. The dominance of Western scientific paradigms historically positioned as the ultimate authority on sustainability reflects and reinforces global power imbalances. Researchers seek to explore the interplay of power, knowledge production, and political interests in the development and implementation of sustainability standards. This study uses a qualitative methodological framework to investigate how sustainability standards emerge, whose interests they serve, and their implications for equitable global governance. The findings reveal that power asymmetries, expert-driven knowledge production and geopolitical interests significantly influence sustainability standards. This raises concerns about the legitimacy and inclusiveness of universally imposed sustainability standards.

Keywords: Power dynamics, sustainability standards, knowledge production, global politics, governance.

A. PENDAHULUAN

Munculnya kerangka kerja standar berkelanjutan mencerminkan meningkatnya kepedulian global terhadap keberlanjutan (Lindsay, Rae, 2020). Standar ini, yang mencakup pedoman, sertifikasi, dan kebijakan, bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan kesetaraan sosial. Namun, perumusan dan penegakan standar ini jauh dari proses yang netral atau diterima secara universal. Standar itu muncul dalam jaringan relasi kekuasaan, produksi pengetahuan melalui kontestasi yang sengit, serta pertimbangan geopolitik.

Keberlanjutan beragam dan sering ditafsirkan secara berbeda di berbagai konteks budaya, ekonomi, dan politik. Pluralitas interpretasi ini mengarah pada beragam pendekatan untuk menetapkan standar berkelanjutan, masing-masing mencerminkan nilai, prioritas, dan struktur kekuasaan tertentu. Misalnya, standar yang dikembangkan di negara-negara industri dapat memprioritaskan solusi teknologi dan mekanisme berbasis pasar, sementara yang muncul dari daerah berkembang mungkin menekankan praktik berbasis komunitas dan pengetahuan ekologi tradisional. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang pengetahuan siapa yang dilegitimasi dalam proses penetapan standar dan kepentingan siapa yang dilayani atau dipinggirkan.

Dinamika kekuasaan memainkan peran penting dalam membentuk standar berkelanjutan (Power, Kate, 2010). Aktor dominan, termasuk perusahaan multinasional, organisasi internasional, dan pemerintah yang berpengaruh, sering kali memiliki pengaruh yang signifikan atas pembuatan dan penyebarluasan standar ini. Keterlibatan mereka dapat mengarah pada promosi standar yang selaras dengan kepentingan mereka, yang berpotensi menggesampingkan kebutuhan dan perspektif pemangku kepentingan yang kurang kuat seperti masyarakat lokal, produsen skala kecil, dan penduduk lokal. Ketidakseimbangan ini dapat mengakibatkan standar yang sehat secara teknis namun tidak adil secara sosial, merusak tujuan holistik keberlanjutan.

Produksi pengetahuan adalah dimensi penting lainnya dalam politik standar berkelanjutan (Katja, 2022). Hak istimewa pengetahuan ilmiah dan teknis, yang sebagian besar dihasilkan di Negara Utara, sering membayangi sistem pengetahuan lokal dan pribumi di Negara Selatan. Dominasi epistemik ini dapat menyebabkan standar yang tidak tepat atau tidak efektif dalam konteks sosio-ekologis. Misalnya, standar keberlanjutan pertanian yang hanya didasarkan pada praktik pertanian industri mungkin tidak berlaku atau bermanfaat bagi petani kecil yang mempraktikkan pertanian tradisional di ekosistem yang beragam. Mengenali dan

mengintegrasikan berbagai sistem pengetahuan sangat penting untuk menciptakan standar berkelanjutan yang inklusif dan efektif.

Lanskap politik semakin memperumit pembentukan dan penerapan standar berkelanjutan. Ketegangan geopolitik, persaingan ekonomi, dan prioritas nasional yang berbeda dapat menyebabkan konflik atas proses penetapan standar dan mekanisme kepatuhan. Penerapan standar keberlanjutan oleh negara-negara yang kuat secara ekonomi dapat dianggap sebagai bentuk neo-kolonialisme, yang memicu perlawanan dari negara-negara berkembang. Selain itu, standar keberlanjutan sukarela, meskipun bermanfaat dalam mempromosikan praktik terbaik, mungkin kurang legitimasi dan penegakan hukum di wilayah di mana pemangku kepentingan lokal dikecualikan dari proses pengambilan keputusan.

Interaksi kekuasaan, pengetahuan, dan politik dalam standar berkelanjutan secara signifikan berdampak pada upaya keberlanjutan global. Standar yang gagal memperhitungkan beragam perspektif dan hubungan kekuasaan yang adil dapat menyebabkan tantangan kepatuhan, perlawanan, dan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. Sebaliknya, proses penetapan standar yang inklusif dan partisipatif yang mengakui dan mengintegrasikan beragam sistem pengetahuan dan mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan dapat meningkatkan legitimasi, penerimaan, dan efektivitas standar berkelanjutan. Artikel ini menyelidiki dinamika kekuasaan yang tertanam dalam standar berkelanjutan, dengan fokus pada pertanyaan penelitian berikut: Bagaimana pengetahuan tentang keberlanjutan diproduksi dan dilegitimasi? Kepentingan siapa yang diwakili oleh standar berkelanjutan, dan bagaimana mereka diperebutkan? Apa implikasi politik dari standar berkelanjutan global untuk tata kelola yang adil? .

Tinjauan Literatur

Sejarah Pembangunan Berkelanjutan

Jauh sebelum istilah ‘keberlanjutan’ muncul, masyarakat adat mempraktikkan cara hidup yang selaras dengan prinsip-prinsip berkelanjutan. Suku-suku asli Amerika, misalnya, menganut filosofi ‘Tujuh Generasi’, yang menekankan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan dampaknya pada tujuh generasi berikutnya. Demikian pula, orang-orang Maori di Selandia Baru menganut pandangan dunia yang disebut kaitiakitanga, yang menganjurkan perwalian lingkungan alam. Masyarakat adat di Indonesia juga sampai saat ini masih menjaga prinsip hidup sederhana dan harmonis dengan alam, salah satunya suku Baduy. Tradisi filosofis kuno juga mencerminkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Konfusianisme di

Tiongkok menekankan keselarasan antara manusia dan alam, sementara agama Hindu dan Buddha mempromosikan gagasan hidup minimal dan menghormati semua bentuk kehidupan. Di agama Islam manusia merupakan khalifah yang memiliki kewajiban untuk menjaga bumi. Di Yunani, konsep Aristoteles tentang oikonomia (manajemen rumah tangga) termasuk pengelolaan sumber daya, meletakkan dasar awal untuk pemikiran ekonomi yang berkelanjutan.

Pergeseran dari gaya hidup nomaden ke masyarakat pertanian yang menetap menandai titik balik yang signifikan dalam hubungan umat manusia dengan alam. Peradaban kuno di Mesopotamia, Lembah Indus, dan Mesoamerika mengembangkan sistem irigasi yang canggih dan teknik rotasi tanaman untuk mengelola sumber daya alam secara efisien. Namun, praktik yang tidak berkelanjutan, seperti deforestasi, menyebabkan runtuhnya beberapa masyarakat ini, yang menggambarkan peringatan dini tentang konsekuensi dari salah urus lingkungan. Revolusi Industri mewakili pergeseran dramatis dalam interaksi manusia dengan lingkungan. Didorong oleh inovasi teknologi, produksi massal, dan bahan bakar fosil, membawa pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya tetapi juga degradasi ekologis yang signifikan. Deforestasi, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam meningkat seiring dengan industrialisasi yang menyebar ke seluruh Eropa dan Amerika Utara.

Terlepas dari ekspansi industri yang cepat, protes-protes yang memperingatkan konsekuensi lingkungan mulai muncul. Filsuf seperti Henry David Thoreau dan John Ruskin mengkritik industrialisasi dan menganjurkan untuk kembali ke kehidupan yang lebih sederhana dan berpusat pada alam. Buku Thoreau, *Walden* (1854), menekankan pentingnya kemandirian dan harmoni dengan alam, sementara karya-karya Ruskin menyoroti implikasi moral industrialisasi. Pada abad ke-19 lahir gerakan konservasi yang terorganisir. Di Amerika Serikat, tokoh-tokoh seperti John Muir memperjuangkan pelestarian alam liar, yang mengarah pada pendirian taman nasional seperti Yellowstone pada tahun 1872. Demikian pula, Eropa menyaksikan munculnya program pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya kayu dalam jangka panjang.

Abad ke-20 menandai titik balik dalam kesadaran global tentang keberlanjutan. Kerusakan yang disebabkan oleh dua Perang Dunia dan ledakan industri pasca-perang meningkatkan kekhawatiran tentang penipisan sumber daya dan degradasi lingkungan. Buku penting Rachel Carson, *Silent Spring* (1962), mengungkapkan bahaya penggunaan pestisida, yang memicu gerakan lingkungan modern. Karyanya menginspirasi legislasi seperti Clean Air Act (1963) dan pendirian Badan Perlindungan Lingkungan AS pada tahun 1970.

an lahir upaya internasional pertama untuk menangani keberlanjutan secara global. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan Konferensi Stockholm tentang Lingkungan Manusia pada tahun 1972, yang menekankan saling keterkaitan antara isu lingkungan dan pembangunan. Konferensi ini meletakkan dasar bagi inisiatif-inisiatif selanjutnya, termasuk pendirian Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP). Salah satu tonggak paling berpengaruh dalam sejarah keberlanjutan terjadi pada tahun 1987 dengan diterbitkannya Laporan Brundtland, yang berjudul *Our Common Future, Masa Depan Kita Bersama*. Laporan tersebut memperkenalkan definisi pembangunan berkelanjutan yang kini terkenal: “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” “pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.” Definisi ini menghubungkan perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan sosial, membentuk wacana keberlanjutan modern.

Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (UNCED) tahun 1992, yang umumnya dikenal sebagai KTT Bumi, merupakan peristiwa penting dalam sejarah keberlanjutan. Diselenggarakan di Rio de Janeiro, konferensi ini mengumpulkan para pemimpin dari seluruh dunia untuk mengadopsi Agenda 21, sebuah rencana komprehensif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kesepakatan kunci termasuk Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Konvensi Kerangka tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), dan Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati. Berdasarkan UNFCCC, Protokol Kyoto menetapkan target yang mengikat secara hukum untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Meskipun menghadapi kritik karena ruang lingkupnya yang terbatas dan kurangnya mekanisme penegakan, hal ini merupakan langkah penting menuju tata kelola iklim global.

Di abad ini muncul inisiatif keberlanjutan perusahaan. Konsep seperti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan triple bottom line (manusia, planet, keuntungan) semakin mendapat perhatian seiring dengan mulai dikenalnya peran bisnis dalam memajukan pembangunan berkelanjutan. Organisasi seperti Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (WBCSD) memainkan peran kunci dalam mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan. Perjanjian Paris, yang diadopsi di bawah UNFCCC pada tahun 2015, merupakan salah satu upaya global yang paling ambisius untuk memerangi perubahan iklim. Tujuannya untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri telah mendorong tindakan dari pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil. Pada tahun yang sama,

Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang mencakup 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Tujuan-tujuan ini menangani berbagai isu, mulai dari penghapusan kemiskinan dan kesetaraan gender hingga energi bersih dan tindakan iklim. Berbeda dengan kerangka kerja sebelumnya, TPB menekankan penerapan universal, mengakui bahwa tantangan keberlanjutan mempengaruhi semua negara.

Abad ke-21 juga terjadi kemajuan pesat dalam teknologi yang telah mengubah lanskap keberlanjutan. Inovasi seperti teknologi energi terbarukan, pertanian presisi, dan alat digital untuk pemantauan lingkungan telah memperluas kemungkinan solusi berkelanjutan. Namun, kemajuan ini juga menyoroti perlunya menangani masalah seperti limbah elektronik dan kesenjangan digital. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan, beberapa organisasi telah dituduh melakukan “greenwashing” membuat klaim yang dangkal atau menyesatkan tentang praktik lingkungan mereka. Hal ini memicu seruan untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar. Salah satu tantangan yang terus-menerus dalam mencapai keberlanjutan adalah mengatasi ketidakadilan global. Negara-negara berkembang sering kali kekurangan sumber daya untuk menerapkan praktik berkelanjutan, sementara negara-negara maju terus menanggung tanggung jawab yang tidak proporsional atas emisi historis dan eksploitasi sumber daya. Dominasi pemikiran ekonomi jangka pendek dan pengaruh industri yang kuat, seperti bahan bakar fosil, menjadi hambatan signifikan bagi perubahan sistemik. Mengatasi hambatan ini memerlukan tindakan terkoordinasi di semua tingkat masyarakat.

Sejarah keberlanjutan mengungkapkan perjalanan yang kompleks dan terus berkembang, dibentuk oleh berbagai kekuatan budaya, politik, dan ekonomi. Dari filosofi kuno yang menekankan harmoni dengan alam hingga kerangka global modern seperti SDGs, keberlanjutan secara konsisten berusaha untuk menyeimbangkan kebutuhan manusia dan planet. Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai, jalan menuju masa depan yang benar-benar berkelanjutan tetap dipenuhi tantangan. Dengan belajar dari masa lalu dan membangun pengetahuan kolektif, umat manusia dapat bekerja menuju masa depan yang tangguh dan adil untuk generasi yang akan datang.

Kemunculan Standar Berkelanjutan

Dalam beberapa tahun terakhir, standar berkelanjutan telah berkembang biak dalam menanggapi tantangan keberlanjutan global, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati (Ciplet, David, 2015), dan ketidaksetaraan sosial. Standar ini, termasuk kerangka kerja seperti ISO, sertifikasi Fairtrade, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (UN-

SDGs), dimaksudkan untuk mengukur, mengatur, dan mempromosikan praktik berkelanjutan (Kaplinsky, Raphael, 2018). Standar ini, yang mencakup sertifikasi, pedoman, dan kebijakan, berupaya mempromosikan praktik berkelanjutan di berbagai sektor. Para sarjana seperti Bernstein dan Cashore berpendapat bahwa standar berkelanjutan mewakili bentuk tata kelola global non-negara di mana organisasi internasional, perusahaan, dan LSM menetapkan norma-norma di luar mekanisme negara tradisional (Bernstein, 2007). Namun, standar ini sering tertanam dalam logika pasar neoliberal, di mana keberlanjutan menjadi terkomodifikasi dan didepolitisasi. Misalnya, (Ponte, 2019) mengkritik peran perusahaan dalam penetapan standar, mencatat bahwa banyak standar terutama melayani kepentingan perusahaan dengan kedok perlindungan lingkungan.

Tinjauan sistematis oleh (Oliveira, 2021) menyoroti peningkatan integrasi keberlanjutan dan inovasi dalam praktik organisasi dan menggarisbawahi peran standar dalam memfasilitasi konvergensi ini. Namun, pengembangan dan adopsi standar ini dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan yang kompleks. Sebuah studi oleh (Patterson, James, 2017) mengeksplorasi tata kelola dan politik transformasi menuju keberlanjutan, menekankan perlunya pendekatan inklusif dan partisipatif dalam proses penetapan standar (Heizmann, Helena, 2015), mengingat standar mencerminkan dan memperkuat ideologi dan hierarki yang dominan, mengutamakan pengetahuan teknis dan ilmiah yang dihasilkan oleh para ahli di Global North, sementara sistem pengetahuan lokal dan pribumi terpinggirkan. Asimetri pengetahuan ini terbukti bahwa sifat teknokratik standar yang mengecualikan petani kecil dan masyarakat lokal dari proses pengambilan keputusan.

Sarjana pembangunan kritis, Escobar, berpendapat bahwa dominasi epistemik ini melanggengkan dinamika kekuasaan kolonial, di mana pengetahuan dari Negara Selatan diremehkan (Sulthana, 2022). Sebuah artikel yang ditulis oleh (Bennett, 2019) membahas kemajuan dalam metode kualitatif dalam penelitian lingkungan, menyoroti pentingnya mengungkap hubungan bermuansa antara pemangku kepentingan dalam keberlanjutan. Selanjutnya, peran berbagai aktor dalam membentuk kebijakan lingkungan telah diteliti dalam sebuah studi oleh (Schupfer, 2024) yang meneliti bagaimana konflik antara kelompok lingkungan, produsen bahan bakar fosil, dan perusahaan utilitas memengaruhi kebijakan energi negara, menjelaskan perebutan kekuasaan yang melekat dalam mengembangkan standar berkelanjutan.

Politik Standar Keberlanjutan

Dimensi politik standar berkelanjutan bermanifestasi dalam dua cara umum: (1) Persaingan Geopolitik: Standar global sering mencerminkan struktur tata kelola yang dipimpin Barat, memungkinkan ekonomi berkembang. Misalnya, standar ISO, yang dipimpin oleh negara maju, sering menciptakan hambatan bagi bisnis di negara berkembang karena biaya sertifikasi yang tinggi. (2) Kesenjangan Utara-Selatan: Standar berkelanjutan diperebutkan antara Negara Utara, yang mendorong penetapan standar, dan Negara Selatan, yang menanggung beban implementasi. Kesenjangan ini diperburuk oleh akses yang tidak setara ke sumber daya, teknologi, dan kekuatan pengambilan keputusan.

Beirmann menyoroti bagaimana tata kelola lingkungan global mendukung negara-negara industri, meninggalkan negara-negara berkembang dengan suara terbatas dalam negosiasi (Biermann, 2011). Biermann juga mengeksplorasi bagaimana perubahan politik terjadi karena Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan dalam kondisi apa perkembangan ini dapat mendukung transformasi keberlanjutan. Selain itu, dampak politik dari SDGs telah dianalisis melalui studi ilmiah yang ekstensif. Demikian pula Pattberg mengidentifikasi asimetri kekuasaan dalam inisiatif penetapan standar transnasional (Pattberg, 2005). Sebuah artikel pelengkapan oleh Analisis komprehensif oleh Kroll meneliti lebih dari 3.000 studi ilmiah tentang SDGs, memberikan wawasan tentang implikasi politiknya dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya (Kroll, 2022).

B. Metodologi

Penelitian ini bertujuan untuk memajukan pengetahuan dan menghasilkan data baru di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi, mengintegrasikan beberapa sumber data untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas sekaligus mengurangi keterbatasan pendekatan sumber tunggal.

Metode utama yang digunakan adalah penelitian perpustakaan, yang melibatkan:

1. Analisis dokumen laporan resmi, dokumen kebijakan, dan materi arsip untuk memberikan pemahaman mendasar tentang pokok bahasan.
2. Tinjauan konten media, dengan fokus pada artikel berita yang relevan, opini, dan laporan investigasi untuk mengidentifikasi perdebatan kontemporer dan implikasi dunia nyata.
3. Tinjauan literatur yang komprehensif, mengacu pada buku ilmiah, artikel jurnal, dan sumber daya akademik lainnya untuk memeriksa kerangka teoritis, studi yang ada, dan konsep kunci yang terkait dengan topik tersebut.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, menekankan eksplorasi kompleksitas dan dinamika politik standar berkelanjutan. Metode ini memastikan analisis masalah yang holistik dan bermuansa dengan memanfaatkan beragam sumber tertulis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hegemoni Perusahaan dan Kelembagaan dalam Penetapan Standar

Dominasi aktor perusahaan dan kelembagaan dalam menciptakan standar yang berkelanjutan menggarisbawahi bagaimana asimetri kekuasaan membentuk konten dan implementasinya (Diebecker, Jan, 2017). Korporasi sering memimpin inisiatif penetapan standar, memanfaatkan sumber daya keuangan dan jangkauan global mereka untuk memengaruhi hasil yang selaras dengan model bisnis mereka. Misalnya, standar keberlanjutan di sektor energi sering memprioritaskan efisiensi biaya daripada keseimbangan ekologis jangka panjang, yang mencerminkan prioritas lobi industri yang kuat. Entitas-entitas ini mungkin berpendapat bahwa keterlibatan mereka mempromosikan inovasi dan efisiensi, tetapi kenyataannya lebih kompleks. Standar mereka mencerminkan prioritas perusahaan, seperti profitabilitas, perluasan pasar, atau pengurangan biaya, daripada kesejahteraan sosial atau ekologis.

Di sektor energi, standar keberlanjutan sering berfokus pada efisiensi biaya daripada integritas ekologis. Misalnya, perusahaan yang mengadvokasi transisi ke energi terbarukan menekankan solusi seperti panel surya atau turbin angin. Meskipun teknologi ini mengurangi emisi karbon, mereka sangat bergantung pada mineral tanah jarang seperti kobalt dan lithium. Ekstraksi mineral ini, terutama dari negara-negara di Afrika atau Amerika Latin, sering menyebabkan degradasi lingkungan yang parah, perpindahan masyarakat lokal, dan eksloitasi tenaga kerja. Lobi industri yang mewakili perusahaan besar memengaruhi standar ini untuk memastikan rantai pasokan yang stabil untuk teknologi terbarukan. Akibatnya, standar tersebut tidak cukup menangani dampak sosial dan lingkungan kegiatan pertambangan di negara berkembang.

Standar emisi global sering berfokus pada solusi teknologi seperti sistem perdagangan karbon atau adopsi energi terbarukan, yang membutuhkan sumber daya keuangan dan teknis yang signifikan. Standar ini mungkin tidak realistis atau kontraproduktif bagi Negara-negara Selatan di mana akses energi dan pembangunan ekonomi menjadi masalah yang mendesak. Misalnya, sementara negara Eropa mungkin beralih ke energi angin, negara berkembang yang bergantung pada batu bara mungkin menemukan pergeseran seperti itu secara ekonomi dan

teknis tidak layak tanpa dukungan finansial dan teknis yang substansial. Hasilnya adalah kurangnya kesetaraan dalam mengatasi tantangan lingkungan global.

Selain itu, lembaga multilateral seperti Organisasi Internasional untuk Standardisasi (*International Organization for Standardization/ ISO*), Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/ WTO*), dan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (*The United Nations Framework Convention on Climate Change/ UNFCCC*) memainkan peran penting dalam membungkai tolok ukur global. Lembaga-lembaga ini diharapkan untuk mempertahankan netralitas dan inklusivitas tetapi secara inheren dibentuk oleh kepentingan dan ideologi anggotanya yang paling berpengaruh, biasanya negara-negara kaya dan perusahaan besar; ini menimbulkan pertanyaan tentang inklusivitas dan legitimasi standar ini, terutama bagi pemangku kepentingan di Negara Selatan yang mungkin tidak memiliki perwakilan dalam forum ini. Misalnya, Standar Manajemen Lingkungan ISO (ISO 14001) menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen lingkungan. Meskipun inisiatif ini tampaknya bermanfaat, proses sertifikasinya mahal dan menuntut secara teknis. Perusahaan besar mampu membayar biaya ini, mendapatkan keuntungan di pasar global, sementara perusahaan kecil di negara berkembang berjuang untuk bersaing. Akibatnya, standar tersebut secara tidak sengaja memperlebar kesenjangan antara negara maju dan berkembang.

Hegemoni perusahaan dan kelembagaan dalam penetapan standar mencerminkan dinamika ketidaksetaraan global yang lebih luas. Meskipun aktor-aktor ini sangat penting dalam membentuk inovasi dan kemajuan, dominasi mereka sering kali menggesampingkan pemangku kepentingan yang lemah, melanggengkan ketidaksetaraan. Mengatasi ketidakseimbangan ini membutuhkan upaya yang disengaja untuk membuat proses penetapan standar lebih inklusif, representatif, dan akuntabel, memastikan bahwa standar global benar-benar melayani kebaikan bersama daripada kepentingan sempit segelintir orang yang berkuasa. Salah satu konsekuensi yang paling mencolok dari hegemoni perusahaan dan institusional adalah pengucilan pemangku kepentingan dari Negara Selatan. Daerah-daerah ini seringkali tidak memiliki kapasitas keuangan, teknis, dan kelembagaan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses penetapan standar. Akibatnya, standar yang dihasilkan tidak selaras dengan kebutuhan mereka, melanggengkan ketidaksetaraan historis.

Politik Epistemik dan Produksi Pengetahuan

Gustaman mengemukakan hal penting yang perlu digarisbawahi, ia berdasarkan temuannya, pada zaman kolonial para ahli sejarah Barat banyak mengeksplorasi nusantara, mempublikasikan dan membawa berbagai temuan ke Barat. Eksplorasi ini berkaitan erat dengan aspek politis berupa produksi pengetahuan untuk kepentingan kolonial. Kita dapat menggunakan perspektif ini sebagai tonggak awal untuk melihat bagaimana produksi pengetahuan dioperasikan untuk pengembangan standar keberlanjutan (Gustaman, 2024).

Keahlian ilmiah memainkan peran penting dalam membentuk pengembangan standar berkelanjutan. Namun, produksi dan penyebaran pengetahuan ilmiah dapat dipengaruhi oleh sumber pendanaan, afiliasi institusional, dan bias disiplin. Misalnya, penelitian yang didanai oleh perusahaan dapat memprioritaskan jenis pengetahuan tertentu yang mendukung minat mereka. Tetapi lebih dari itu, pembangunan keahlian dalam standar berkelanjutan adalah masalah politik dan epistemologis yang mendalam. Ini menggarisbawahi persimpangan kekuasaan, pengetahuan, dan legitimasi dalam menentukan perspektif dan metodologi siapa yang diakui dan dihargai. Paradigma ilmiah Barat secara historis diposisikan sebagai otoritas tertinggi tentang keberlanjutan, seringkali dengan mengorbankan sistem pengetahuan yang beragam, spesifik konteks, dan tertanam secara budaya. Dominasi ini mencerminkan dan memperkuat ketidakseimbangan kekuatan global, mengutamakan sistem pengetahuan yang berakar di Negara Utara sambil meminggirkan mereka yang berasal dari Negara Selatan dan komunitas Pribumi.

Paradigma ilmiah Barat sering menekankan pendekatan reduksionis, dengan fokus pada variabel terisolasi dan data yang dapat diukur. Meskipun metode ini telah menghasilkan kemajuan yang signifikan, mereka mengabaikan kompleksitas dan interkoneksiitas sistem sosio-ekologis. Sistem pengetahuan adat, sebaliknya, sering mengadopsi perspektif holistik, mengintegrasikan dimensi ekologis, budaya, spiritual, dan sosial. Sistem ini didasarkan pada pengalaman hidup dan adaptasi berabad-abad terhadap lingkungan lokal, menawarkan wawasan berbasis tempat dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Namun, bias epistemik sains Barat mengkategorikan pengetahuan pribumi sebagai anekdot, tidak dapat diverifikasi, atau bahkan takhayul. Kategorisasi ini mengabaikan kerangka epistemologis di mana masyarakat adat menghasilkan, memvalidasi, dan menerapkan pengetahuan mereka. Misalnya, pertanian rotasi di banyak komunitas adat didasarkan pada pemahaman mendalam tentang siklus kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Namun,

praktik semacam itu sering diabaikan demi model pertanian industri yang memprioritaskan hasil jangka pendek daripada kesehatan ekologis jangka panjang.

Dinamika Politik dan Ketimpangan Struktural

Pemberlakuan standar keberlanjutan pada negara berkembang merupakan bentuk neokolonialisme, di mana pola historis eksplorasi dan kontrol diabadikan dengan kedok perlindungan lingkungan dan tata kelola global. Sementara retorika keberlanjutan menekankan tanggung jawab bersama, realitas seringkali secara tidak proporsional membebani Global South, memperburuk ketidaksetaraan dan merusak lembaga lokal. Dinamika ini memperkuat ketidaksetaraan struktural antara Negara Utara dan Negara Selatan, melanggengkan siklus ketergantungan dan pengucilan.

Standar keberlanjutan sebagian besar dikembangkan dan ditegakkan oleh institusi, pemerintah, dan perusahaan di Negara Utara, seperti UE, ISO, atau lembaga sertifikasi multinasional seperti Fair Trade atau Rainforest Alliance. Standar ini sering dirancang tanpa masukan yang berarti dari para pemangku kepentingan di Negara Selatan, sehingga menghasilkan kriteria yang mungkin tidak relevan, tidak pantas, atau terlalu memberatkan bagi produsen di negara berkembang. Misalnya, meskipun progresif dalam tujuan iklimnya, Kesepakatan Hijau UE mencakup langkah-langkah perdagangan seperti Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (*Carbon Border Adjustment Mechanism/ CBAM*) yang membebankan biaya kepatuhan pada eksportir di negara berkembang (Cecilia, Bellora, 2023). Eksportir ini, seringkali tidak memiliki sumber daya keuangan dan teknis untuk memenuhi persyaratan tersebut, menghadapi hambatan untuk masuk pasar.

Banyak standar keberlanjutan membutuhkan teknologi, infrastruktur, atau keahlian yang tidak dapat diakses oleh produsen skala kecil di Negara Selatan. Misalnya, Sertifikasi dan standar Pertanian yang membutuhkan teknologi pertanian presisi, seperti mesin yang dipandu GPS atau sistem irigasi canggih, tidak dapat dicapai oleh banyak petani subsisten. Transisi energi dan tuntutan adopsi energi terbarukan dapat mengabaikan kenyataan jaringan energi yang terbelakang dan kendala keuangan di banyak negara Afrika dan Asia. Persyaratan ini menciptakan ketergantungan pada bantuan asing, teknologi, atau layanan konsultasi dari Negara Utara, memperkuat subordinasi ekonomi.

Standar keberlanjutan sering mengalihkan beban keuangan dan operasional kepatuhan kepada produsen di Negara Selatan sementara konsumen di Negara Utara diuntungkan. Misalnya, konsumen Barat menuntut kopi atau kakao bersertifikat ramah lingkungan tetapi

jarang mempertimbangkan peningkatan biaya yang ditanggung oleh petani untuk proses sertifikasi, audit, dan penyesuaian praktik pertanian. Dinamika ini mencerminkan pola perdagangan kolonial historis, di mana bahan mentah diekstraksi dengan murah dari koloni sementara nilai tambah dan keuntungan terkonsentrasi di pusat-pusat kekaisaran.

Pemaksaan standar yang dirancang secara eksternal merusak kedaulatan negara-negara berkembang dalam menentukan jalur keberlanjutan mereka. Negara-negara berkembang sering kali memiliki konteks sosial-ekonomi dan lingkungan yang unik yang membutuhkan pendekatan yang disesuaikan. Namun, ketika keberlanjutan menjadi syarat untuk akses pasar atau pendanaan internasional, negara-negara ini harus memprioritaskan tuntutan eksternal daripada kebutuhan dan aspirasi mereka.

Contoh lainnya, negara yang kaya akan sumber daya bahan bakar fosil dapat memprioritaskan keamanan energi dan pembangunan ekonomi melalui ekstraksi sumber daya, tetapi tekanan internasional untuk dekarbonisasi segera dapat membatasi opsi ini. Tekanan eksternal ini sering mengabaikan emisi historis Negara Utara dan hak negara-negara Selatan untuk mengejar pembangunan yang adil. Dinamika ini mencerminkan pola yang lebih luas dalam tata kelola lingkungan global, di mana Negara Utara mendominasi penetapan agenda, pembiayaan, dan penegakan aturan. Pada saat yang sama, Negara Selatan menanggung beban implementasi dan biaya.

Persaingan Geopolitik dan Kontrol Sumber Daya

Transisi menuju teknologi energi terbarukan telah memperkuat permintaan global untuk mineral penting seperti lithium, kobalt, dan mineral langka bumi (*Rare earth elements/ REEs*). Mineral ini sangat penting dalam baterai, turbin angin, panel surya, dan teknologi energi bersih lainnya. Namun, meningkatnya permintaan ini telah memicu persaingan geopolitik dan menimbulkan pertanyaan signifikan tentang keberlanjutan, kedaulatan sumber daya, dan dimensi etis pengendalian sumber daya. Ketegangan antara tujuan keberlanjutan global dan aspirasi pembangunan negara-negara kaya sumber daya mencontohkan salah satu dilema paling mendesak dalam hubungan internasional kontemporer (Syarifah, 2024).

Pergeseran dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan merupakan salah satu transformasi paling ambisius dalam sejarah manusia. Pergeseran ini sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim, memastikan keamanan energi, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDGs*). Namun, itu juga membutuhkan jumlah mineral kritis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lithium dan kobalt, misalnya, sangat

penting untuk memproduksi baterai berkapasitas tinggi yang digunakan dalam kendaraan listrik (*Electric Vehicle/ EV*) dan sistem penyimpanan energi. Badan Energi Internasional (*International Energy Agency/ IEA*) memperkirakan bahwa permintaan lithium dapat meningkat lebih dari 40 kali lipat pada tahun 2040, sementara permintaan kobalt dapat meningkat 20 kali lipat.

Namun, ekstraksi dan rantai pasokan mineral ini terkonsentrasi di beberapa negara, menciptakan ketegangan geopolitik. Misalnya, Republik Demokratik memproduksi lebih dari 70% kobalt dunia. Australia, Chili, dan China mendominasi rantai pasokan lithium global. China mengendalikan lebih dari 60% kapasitas pemrosesan REE global (Soda, 2023). Dinamika ini membuat rantai pasokan mineral penting rentan terhadap gangguan dan memperburuk persaingan geopolitik karena negara dan perusahaan berusaha mengamankan akses. Persaingan geopolitik meningkat karena kekuatan signifikan berusaha mengendalikan aliran mineral kritis, melihatnya sebagai aset strategis. Misalnya, AS dan Uni Eropa telah mengadopsi kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan yang didominasi Tiongkok, sementara Tiongkok telah memperluas investasinya dalam operasi pertambangan di seluruh dunia. Pengaruh perusahaan swasta dan BUMN semakin memperumit persaingan ini.

Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara berkembang yang kaya sumber daya, terutama di Afrika dan Amerika Selatan. Dengan berinvestasi dalam operasi pertambangan dan infrastruktur, Tiongkok mengamankan pasokan mineral penting sambil menawarkan insentif keuangan kepada negara tuan rumah. Namun, pendekatan ini telah menuai kritik karena menciptakan ketergantungan ekonomi dan merusak tujuan keberlanjutan lokal. Sementara itu, Amerika Serikat dan negara-negara Eropa telah meluncurkan inisiatif untuk mengimbangi dominasi China. Misalnya, Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS (*Inflation Reduction Act/ IRA*) memberi insentif kepada produksi mineral domestik dan kemitraan dengan negara-negara sekutu (Church, 2016). Demikian pula, Undang-Undang Bahan Baku Kritis UE bertujuan untuk mendiversifikasi rantai pasokan dan mengurangi ketergantungan strategis. Namun, kebijakan ini sering mengecualikan negara-negara berkembang dari manfaat yang adil, memperkuat kesen-

Nasionalisme Sumber Daya

Dalam geopolitik kontemporer, bahan bakar fosil merupakan sumber daya yang sangat strategis, memengaruhi ekonomi, kekuatan, dan hubungan internasional. Namun, dominasi energi fosil perlahan bergeser seiring dengan transisi menuju energi terbarukan, sebagai respon terhadap tantangan perubahan iklim melalui upaya seperti dekarbonisasi dan pencapaian net

zero emission. Perubahan ini membawa dampak besar terhadap geopolitik global, yang akan merombak hubungan antar negara dan menimbulkan perubahan struktural dalam ekonomi serta masyarakat. Dunia yang terbentuk dari transisi energi terbarukan akan berbeda jauh dengan dunia yang dibangun di atas bahan bakar fosil, baik dari segi kecepatan maupun jangkaunya. Didorong oleh dua faktor utama—keberlanjutan dan penguasaan terhadap sumber daya alam—negara-negara kaya sumber daya selalu berupaya mengamankan akses energi dan mineral, sekaligus menjalin aliansi strategis dengan negara-negara yang memiliki kepentingan serupa demi saling menguntungkan (Setiadi, 2023).

Negara-negara kaya sumber daya semakin menegaskan kendali atas sumber daya alam mereka, mengadopsi kebijakan untuk memaksimalkan manfaat lokal. Misalnya, Indonesia telah memberlakukan larangan ekspor nikel mentah untuk meningkatkan industri dalam negeri. Sementara langkah-langkah tersebut meningkatkan kedaulatan nasional, Indonesia juga dapat meningkatkan ketegangan dengan perusahaan multinasional dan negara-negara impor. Narasi keberlanjutan yang saling bertentangan semakin memperumit perlombaan global untuk mineral kritis. Negara-negara maju menekankan perlunya sumber yang etis dan perlindungan lingkungan, sering membingkai masalah ini sebagai prasyarat untuk aksi iklim global. Namun, narasi ini dapat bertentangan dengan prioritas pembangunan ekonomi negara-negara kaya sumber daya.

Standar keberlanjutan internasional, seperti yang dipromosikan oleh OECD dan PBB, sering memprioritaskan pengurangan kerusakan lingkungan dan sosial yang terkait dengan pertambangan. Ini termasuk mengatasi deforestasi, kontaminasi air, dan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, menegakkan standar tersebut dapat membatasi kemampuan negara-negara berkembang untuk memanfaatkan sumber daya mereka. Misalnya, di Republik Demokratik Kongo, penambangan kobalt telah dikritik karena melibatkan pekerja anak dan kondisi kerja yang tidak aman. Sementara organisasi dan perusahaan internasional mengadvokasi pengawasan yang lebih ketat, langkah-langkah ini dapat meningkatkan biaya produksi dan mengurangi daya saing, berdampak buruk pada masyarakat lokal yang bergantung pada pertambangan untuk mata pencaharian mereka.

Sementara mineral kritis memungkinkan transisi energi hijau, ekstraksi dan pemrosesannya seringkali intensif energi dan intensif karbon, terutama di negara-negara dengan kapasitas teknologi terbatas. Paradoks ini menyoroti distribusi biaya dan manfaat lingkungan yang tidak merata, karena negara-negara berkembang menanggung beban polusi terkait ekstraksi sementara negara-negara maju menuai manfaat dari teknologi bersih.

Peran Masyarakat Sipil

Sementara organisasi masyarakat sipil sering digambarkan sebagai penyeimbang kekuasaan perusahaan, pengaruh mereka dalam proses penetapan standar sangat bervariasi. LSM internasional besar seperti World Wildlife Fund (WWF) dapat bernegosiasi langsung dengan perusahaan, tetapi organisasi akar rumput yang lebih kecil mungkin berjuang untuk suara mereka didengar. Sayangnya, kemitraan antara perusahaan dan organisasi masyarakat sipil terkadang dapat menghasilkan kompromi yang melemahkan potensi transformatif standar berkelanjutan. Ada potensi bahwa perusahaan akan memanfaatkan kemitraan untuk melakukan “*greenwashing*” atau “*social washing*”.

Greenwashing merupakan praktik penipuan yang dilakukan suatu perusahaan yang mencitrakan dirinya sedemikian rupa, sehingga produk mereka dianggap ramah lingkungan dan sesuai dengan prinsip berkelanjutan untuk menarik konsumen yang sadar lingkungan. Pada kenyataannya, tindakan atau produk mereka memiliki sedikit atau bahkan tidak ada manfaat lingkungan yang nyata. Ini sering digunakan sebagai taktik pemasaran untuk meningkatkan citra publik perusahaan tanpa benar-benar terlibat dalam praktik berkelanjutan. Contohnya, Skandal Emisi perusahaan otomotif Volkswagen (2015) yang mempromosikan kendaraan dieselnya sebagai “diesel bersih” dengan emisi rendah. Namun, terungkap bahwa perusahaan tersebut telah memasang perangkat lunak untuk mengakali uji emisi, dan kendaraan tersebut mengeluarkan nitrogen oksida pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada batas yang ditetapkan (Lusianti, 2023). Contoh lainnya yakni H&M yang meluncurkan “Conscious Collection” dengan klaim menggunakan bahan-bahan yang berkelanjutan. Akan tetapi, terungkap bahwa merek tersebut masih sangat bergantung pada praktik mode cepat, yang pada dasarnya tidak berkelanjutan karena produksi berlebih, pemborosan, dan pembuangan (Lay, 2024).

Sementara itu, pencucian sosial (*social washing*) terjadi ketika perusahaan membesar-besarkan atau memalsukan upaya mereka untuk mempromosikan tujuan sosial atau mencitrakan diri mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab secara sosial demi untuk menarik perhatian konsumen dan pemangku kepentingan. Taktik ini mengalihkan perhatian dari aspek-aspek bermasalah dari operasi mereka. Contohnya adalah praktik yang dilakukan brand fashion Boohoo yang mengklaim menegakkan praktik ketenagakerjaan yang adil. Tetapi, suatu investigasi mengungkapkan bahwa pekerja mereka di pabrik-pabrik Leicester dibayar di bawah upah minimum dan bekerja dalam kondisi yang tidak aman (Webbe, 2020). Perusahaan raksasa, Nestle secara terbuka menekankan komitmennya untuk mengakhiri

pekerja anak dalam rantai pasokan kakaonya. Namun, laporan dari LSM dan jurnalis investigasi telah menyoroti masalah pekerja anak yang terus-menerus terjadi dalam rantai pasokan mereka, yang bertentangan dengan klaim mereka (Vivek, 2024). Standarisasi keberlanjutan ternyata memiliki celah yang dapat disusupi secara buruk dan merusak masyarakat, baik konsumen maupun masyarakat yang terlibat dalam jaringan rantai produksi.

D. Kesimpulan

Standar berkelanjutan adalah alat yang ampuh untuk memajukan tujuan lingkungan dan sosial secara global. Namun, asimetri kekuasaan, bias epistemik, dan ketidaksetaraan struktural sering merusak potensinya. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, fleksibel, dan akuntabel, standar ini dapat menjadi katalis untuk transformasi sejati daripada instrumen eksklusi atau sekedar kontrol.

Hegemoni perusahaan dan kelembagaan dalam penetapan standar mencerminkan dinamika ketidaksetaraan global yang lebih luas. Meskipun aktor-aktor ini sangat penting dalam membentuk inovasi dan kemajuan, dominasi mereka sering kali menggesampingkan pemangku kepentingan yang lemah, melanggengkan ketidaksetaraan. Oleh karenanya untuk mengatasi ketidakseimbangan ini membutuhkan upaya yang disengaja untuk membuat proses penetapan standar lebih inklusif, representatif, dan akuntabel, memastikan bahwa standar global benar-benar melayani kebaikan bersama daripada kepentingan sempit segelintir orang yang berkuasa.

Standar keberlanjutan ibarat dua sisi mata pisau, pertama adalah tujuan mulia sebagai wujud tanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial. Sisi lainnya ternyata menggunakan cita-cita mulia keberlanjutan yang merupakan common will seluruh umat manusia sebagai alibih untuk melancarkan kegiatan buruk dan licik seperti *green washing* dan *social washing* sebagaimana yang terjadi pada skandal Volkswagen 2015, H&M, Boohoo, juga Nestle.

Visi keberlanjutan harus ditata ulang untuk mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas. Transisi yang adil mengakui tanggung jawab historis Negara Utara dan hak pembangunan Negara Selatan. Keberlanjutan tidak dapat dicapai dengan melanggengkan sistem eksloitasi dan ketidaksetaraan tetapi membutuhkan kolaborasi yang tulus, berbagi sumber daya, dan saling menghormati. Penting untuk mencerdaskan masyarakat di Negara Selatan mengingat pengetahuan adalah power.

DAFTAR PUSTAKA

- Bender, K. (2022). Research–Practice–Collaborations in International Sustainable Development and Knowledge Production: Reflections from a Political-Economic Perspective. *The European Journal of Development Research*, 34(4), 1691-1703.
- Bennett, N. J., & Roth, R. (2019). Realizing the transformative potential of conservation through the social sciences, arts and humanities. *Biological Conservation*, 229, A6-A8.
- Bernstein, S., & Cashore, B. (2007). Can non-state global governance be legitimate? An analytical framework. *Regulation & governance*, 1(4), 347-371.
- Biermann, F., & Gupta, A. (2011). Accountability and legitimacy in earth system governance: A research framework. *Ecological economics*, 70(11), 1856-1864.
- Bellora, C., & Fontagné, L. (2023). EU in search of a Carbon Border Adjustment Mechanism. *Energy Economics*, 123, 106673.
- Church, S. (2016). *The Impact of the US Inflation Reduction Act on Global Clean Energy Supply Chains*. Washington D.C: American University Diplomacy Lab.
- (n.d.).
- Ciplet, D., Roberts, J. T., & Khan, M. R. (2015). *Power in a warming world: The new global politics of climate change and the remaking of environmental inequality*. Mit Press.
- Diebecker, J., & Sommer, F. (2017). The impact of corporate sustainability performance on information asymmetry: the role of institutional differences. *Review of Managerial Science*, 11(2), 471-517.
- Gustaman, B. Antara Sains dan Kepentingan Kolonial: Produksi Pengetahuan Spesimen Hewan Nusantara Abad XIX-Awal Abad XX. *Historia: Jurnal Pendidikan dan Penelitian GSejarah*, 7(2), 128-137.
- Heizmann, H., & Olsson, M. R. (2015). Power matters: the importance of Foucault's power/knowledge as a conceptual lens in KM research and practice. *Journal of Knowledge Management*, 19(4), 756-769.
- Kaplinsky, R., & Morris, M. (2018). Standards, regulation and sustainable development in a global value chain driven world. *International Journal of Technological Learning, Innovation and Development*, 10(3-4), 322-346.
- Lay, S.D. (2024). The Impact Of Green Marketing Campaign Towards H&M Indonesia Customers' Purchase Decision: A Case Study On H&M Conscious Collection. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5, 03.
- Lindsay, R., & Martella, R. (Eds.). (2020). *Corporate Social Responsibility–Sustainable Business: Environmental, Social and Governance Fra*. Kluwer Law International BV.
- Lusianti, N. (2023). Analisis Kasus Etika Profesi ‘Dieselgate’ oleh Volkswage, *Geotimes*.
- Pattberg, P. (2005). The institutionalization of private governance: How business and nonprofit organizations agree on transnational rules. *Governance*, 18(4), 589-610.
- Patterson, J., Schulz, K., Vervoort, J., Van Der Hel, S., Widerberg, O., Adler, C., ... & Barau, A. (2017). Exploring the governance and politics of transformations towards sustainability. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 24, 1-16.

- Ponte, S. (2019). Business, power and sustainability in a world of global value chains.
- Power, K., & Mont, O. (2010). The role of formal and informal forces in shaping consumption and implications for sustainable society: Part II. *Sustainability*, 2(8), 2573-2592.
- Schupfer, H. (2024). Legitimacy challenges during sustainability transitions: How fossil fuel incumbents respond to rising sustainability pressures.
- Setiadi, E. (2023). Transisi Energi yang Mengubah Lanskap Geopolitik Global. *Pertamina Energy Institute*.
- Syarifah, C. (2024). Energy Transition: The Unforeseen Security Risks of Decarbonization. *Modern Diplomacy*.
- Soda, E. (2023). IEA: Sampai 2026 Permintaan Batubara Global Mulai Koreksi, Faktor Cina Menentukan. *Tambang.co.id*
- Sultana, F. (2022). The unbearable heaviness of climate coloniality. *Political Geography*, 99, 102638.
- Thoreau, H. D. (2006). *Walden*. Yale University Press.
- Vivek, S. (2024). From Maggi to Cerelac: A look at Nestle controversies over the years. *India Today*.
- Webbe, C. (2020). Boohoo's failing highlight a scandalous disregard for workers' rights. *Independent*.